

Polri Siapkan Operasi Camar II

JAKARTA, KOMPAS — Polisi menyiapkan operasi Camar tahap II untuk melanjutkan misi penangkapan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso, di Poso, Sulawesi Tengah. Pada operasi serupa tahap I yang digelar 26 Januari-26 Maret, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 17 terduga anggota jaringan MIT.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, meski operasi Camar tahap I selesai, misi belum usai karena Santoso belum tertangkap. Karena itu, tim Densus 88 Antiteror Polri tetap berkonsolidasi dan berlatih menjelang operasi Camar II atau Camar Maleo di Palu, Sulteng.

Kepindahan lokasi ke Palu di-

sebabkan TNI sedang melakukan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Poso. Untuk itu, pelaksanaan Camar Maleo akan dilaksanakan sesuai latihan PPRC atau sekitar akhir April.

"Misi penangkapan Santoso akan terus dilanjutkan. Tim Densus 88 tetap bersiap diri untuk operasi lanjutan," ujar Badrodin di Jakarta, Selasa (31/3).

Di Poso, Selasa, latihan puncak PPRC TNI berlangsung dengan skenario ancaman teror dari sebuah negara. Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang meninjau latihan di Bandara Kasiguncu, Poso, Selasa.

Imparsial, LSM yang memantau pelanggaran HAM, mengingatkan, latihan PPRC jangan sampai mengganggu dan me-

ngorbankan kepentingan masyarakat.

Direktur Program Imparsial Al Araf, Selasa, menegaskan, dalam latihan TNI tidak boleh ada operasi khusus, termasuk operasi memburu teroris Santoso dan kelompoknya yang merupakan tugas dan kewenangan kepolisian.

"Jangan berdalih mengadakan latihan untuk membungkus operasi khusus. Apalagi, penanganan terorisme di Indonesia harus mengacu pada UU Polri dan UU Terorisme yang menegaskan kasus teror adalah domain kerja kepolisian," ujarnya.

Di lain pihak, lanjut Al Araf, Polri dinilai cukup berhasil mengatasi terorisme, tetapi mengingatkan untuk selalu bekerja da-

lam kerangka HAM. "Pemerintah harus memberi perhatian khusus atas persoalan di Poso serta mengambil langkah menyeluruh dengan mengedepankan tindakan preventif dan penegakan hukum," kata Al Araf.

Sementara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan, operasi TNI di Poso harus jelas untuk berapa lama, apa yang menjadi sasaran, siapa yang bertanggung jawab, dan terutama jaminan bagi warga sipil di tiga desa yang menjadi kawasan latihan.

"Di Poso terlihat tidak ada koordinasi antara TNI dan Polri. Seperti ada balapan menggelar operasi," kata Haris.